

**PENDIDIKAN FORMAL DAN EKSISTENSI BUDAYA: STUDI ANTROPOLOGI
SOSIAL BUDAYA TERHADAP SUKU KAJANG DI DESA TANA TOA**

Abdul Hafid¹, Kaharuddin², Lukman Ismail³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Pendidikan Sosiologi,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹hafidabdul30@yahoo.com; ²kaharuddin@unismuh.ac.id;

³lukmanismail@unismuh.ac.id

ABSTRACT

Since Sir Isaac Newton, positivist ways of knowing have dominated Society with the logic of modernity that makes people assume that science and technology (scientific knowledge) and local knowledge are an antinomy, where one negates the other. This study utilizes Pierre Bourdieu's conceptual-theoretical framework of Habitus, Capital, and Arena to define and analyze, and explain the attitudes of the Kajang Indigenous Community in Tana Toa towards cultural capital and educational institutions and further, how they interpret and view Education as an alternative to maintaining and preserving culture. 14 respondents who are Customary, Religious and Educational figures representing gender subjects determined by Purposive sampling techniques, were included as informants in the study. Our field findings provide strong evidence that the Kajang Community has adequate strategies and adaptation capabilities in maintaining and preserving the existence of their culture, creating a harmonious blend of local and formal knowledge.

Keyword: formal education, cultural existence, social cultural anthropology

ABSTRAK

Sejak Sir Isaac Newton, cara-cara mengetahui yang positivis telah mendominasi Masyarakat dengan logika modernitas yang membuat orang beranggapan, bahwa sains dan teknologi (pengetahuan ilmiah) dan pengetahuan lokal merupakan suatu antinomi, di mana yang satu menegasikan yang lain. Penelitian ini memanfaatkan kerangka konseptual-teoretis Habitus, Modal, dan Arena dari Pierre Bourdieu untuk mendefinisikan dan menganalisis, serta menjelaskan sikap Masyarakat adat Suku Kajang di Tana Toa terhadap modal budaya dan institusi Pendidikan dan lebih jauh, bagaimana mereka memaknai dan memandang Pendidikan sebagai alternatif untuk mempertahankan dan melestarikan budaya. 14 orang responden yang merupakan tokoh Adat, Agama dan Pendidikan yang mewakili subjek gender ditentukan dengan teknik *Purposive sampling*, disertakan sebagai informan dalam penelitian. Temuan lapangan kami memberi bukti yang kuat bahwa Masyarakat suku Kajang, memiliki strategi dan kemampuan adaptasi yang cukup memadai dalam mempertahankan dan melestarikan eksistensi budaya yang mereka miliki, menciptakan perpaduan harmonis antara pengetahuan lokal dan formal.

Kata Kunci: pendidikan formal, eksistensi budaya, antropologi sosial budaya

A. Pendahuluan

Sejauh ini, penelitian terkait Masyarakat adat juga eksistensi serta relevansi mereka di tengah gempuran berbagai perubahan yang menuntut hampir segala hal untuk menjadi kontemporer, telah difokuskan pada—misalnya, terpinggirnya Masyarakat adat akibat intensifikasi modernisasi. Relevansi Masyarakat dan Lembaga adat juga seringkali, dikaitkan dengan wacana ekologi dan khususnya, seperti telah disorot oleh Batiran & Salim (2020) juga pada tahap tertentu dalam hal ini, Kajembe et al (2003) tentang bagaimana Masyarakat adat berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Musyawarah adat juga diamati penerapannya dalam berbagai skenario termasuk yang terkait dengan praktik perkawinan, warisan juga keadilan hukum. Ini terjadi misalnya, dengan suku Kajang yang berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan, seperti yang gambarkan oleh Syahrul et al (2023) dalam penelitian mereka tentang *rahua* di Nias dan *Kerapatan Adaik* di Sumatera Barat.

Namun, nampaknya belum begitu banyak yang mengarahkan perhatian pada bagaimana Pendidikan, menjadi salah satu alternatif dalam upaya Masyarakat adat mempertahankan eksistensi

budaya dan kearifan lokal mereka, melalui cara-cara yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan peradaban.

Artikel ini secara spesifik akan berfokus pada upaya pelestarian budaya lokal Masyarakat adat Suku Kajang di Desa Tana Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada bagaimana perspektif Masyarakat suku Kajang terhadap Pendidikan formal sebagai praktik alternatif mempertahankan eksistensi dan lebih jauh—menyoroti, bagaimana praktik tersebut dapat relevan sebagai upaya melestarikan budaya lokal Masyarakat Kajang yang cenderung terisolir akan tetapi, dapat terus eksis. Seperti dinyatakan oleh van der Muur (2018) dari total populasi Masyarakat adat yang eksis di seluruh Indonesia, seperempat dari mereka berada di Sulawesi Selatan dan Suku Kajang, hanyalah salah satu yang berhasil mendapatkan pengakuan secara hukum di antara sekian banyak suku yang belum. Setelah konflik antara Perusahaan Perkebunan dan Petani lokal yang mengakibatkan kekerasan, LSM mulai menggunakan identitas khas komunitas tersebut untuk mengklaim ulang tanah yang terletak di dalam konsesi Perusahaan (Tyson, 2010; van der Muur & Bedner,

2016). Bersama dengan segelintir kelompok lain yang tersebar di seluruh Indonesia, Amatoa Kajang merupakan

B. Metode Penelitian

Desain dan Jenis Penelitian

Studi kualitatif ini mengadopsi kerangka konseptual teoretis Bourdieu (1974) tentang reproduksi sosial dengan desain etnografi, untuk membantu mendefinisikan dan menganalisis serta menjelaskan sikap Masyarakat tertentu terhadap modal budaya dan institusi Pendidikan. Dua hal yang dalam pandangan Bourdieu (1974: hal 43-53) merupakan bagian dari sistem disposisi yang tahan lama dan saling mendukung; sistem nilai tersirat yang antara lainnya mencakup konsep mengenai Habitus, Modal dan Arena (Bourdieu & Wacquant, 1992).

Populasi dan Sampel

Dilakukan di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba; data dikumpulkan dengan teknik standar penelitian kualitatif antara lain: 1) Observasi; 2) Wawancara, dan; 3) Dokumentasi. Total populasi dalam studi mencakup sebagian besar Masyarakat dari suku Kajang. Sampel ditentukan dengan teknik *Purposive sampling* sebagai cara untuk memperoleh hanya Informan dengan pengetahuan yang relevan (Agyemang & Parimah, 2022)

salah satu dari kelompok suku teladan yang sering disebutkan dalam laporan sejumlah LSM.

sesuai kriteria berikut: 1) Memiliki pengetahuan tentang subjek/objek yang diteliti; 2) Informan yang dipilih merupakan bagian komunitas yang akan diteliti, dan; 3) Merupakan Tokoh-tokoh adat suku Kajang yang terdiri dari Perempuan, Laki-laki, dan Generasi muda serta *stakeholder* yang memiliki riwayat Pendidikan.

Kriteria yang ditentukan memang lebih merupakan klasifikasi eksplisit inklusi dari pada eksklusi yang karenanya, seluruh atribut yang tidak sesuai dengan—atau merupakan kebalikan dari tiga kriteria di atas, termasuk dalam kriteria eksklusi yang implisit atau dengan kata lain, dikecualikan. Dengan demikian, maka diperoleh komposisi informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis dengan rincian detail seperti diperlihatkan pada tabel 1. Siklus pengolahan dan analisis data akan mencakup beberapa tahapan seperti: a) Pengumpulan Data; b) Reduksi data; c) Penyajian Data, dan; d) Penarikan Kesimpulan. Seluruh tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain sumber, relevansi dan kesesuaian data yang diperoleh, jenis

dan tipe data, serta korelasi berbagai dan di antara data yang akan menentukan konstruksi narasi yang disusun sebagai hasil dan temuan

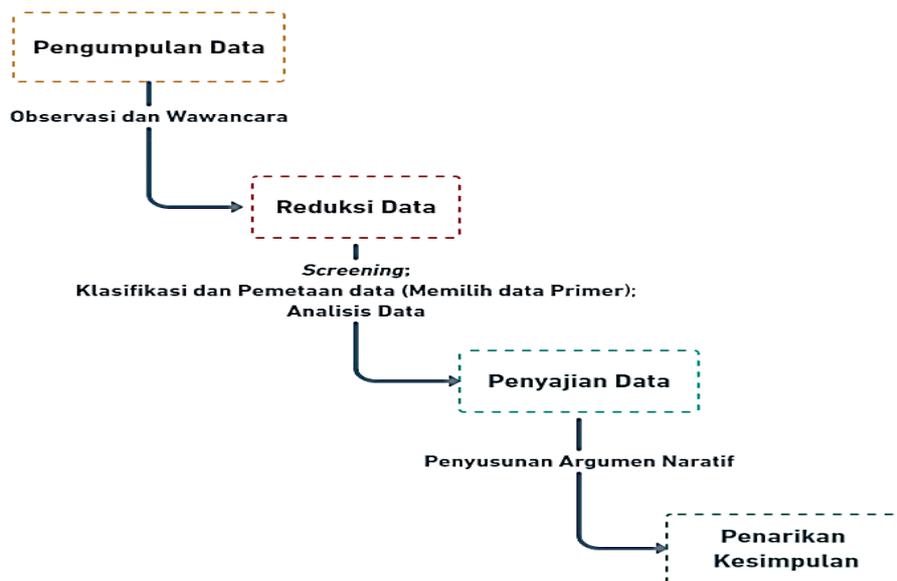
dalam penelitian. Secara detail, seluruh tahapan divisualisasikan oleh gambar 1 dengan rincian-rincian teknis masing-masing.

Tabel 1. Kriteria dan Jumlah Sampel

No	Kriteria	Sampel	
		Jumlah	Frekuensi Gender
1	Tokoh Adat	4	2 Laki-laki; 2 Perempuan
2	Tokoh Agama	3	2 Laki-laki; 1 Perempuan
3	Tokoh Pendidikan	7	4 Perempuan; 3 Laki-laki
Total Sampel		14	7 Laki-laki; 7 Perempuan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data akan

mencakup hal-hal yang termasuk dalam visualisasi berikut.



Gambar 1. Siklus Pengolahan dan Analisis Data

C. Hasil dan Pembahasan

Cara-cara mengetahui yang positivis telah mendominasi masyarakat moderen setidaknya, sejak Sir Isaac Newton (Fazey et al., 2006; Innes & Booher, 2010), yang membuat orang menganggap bahwa

pengetahuan ilmiah (sains dan teknologi) dan pengetahuan lokal, merupakan dua hal yang bertentangan (Thomas, 1997).

Apa yang disebut sebagai “pengetahuan lokal” pada umumnya hanya akan disasosiasikan atau

bahkan, diidentikkan dengan banyak istilah seperti “Informal” dan “Tradisional” juga kadang-kadang, “Pribumi” yang dipahami dalam arti sebagai “Mitos”, bahkan dalam nada yang peyoratif sebagai “Awam”. Sementara di lain sisi, pengetahuan formal atau khusus—sebaliknya, mencerminkan elit ilmiah dan para profesional juga intelektual yang pada umumnya, baik dalam struktur Masyarakat barat maupun non-barat, diartikulasikan dengan teks-teks tertulis (Fischer, 2000); dianggap lebih unggul (Schmidt, 2001) dan progresif (Yang & Wu, 2012), bahkan objektif; dapat diverifikasi, dan dapat diuji menggunakan metode yang diterima oleh sains positif (Hommes et al., 2009; Petts & Brooks, 2006; Taylor & de Loë, 2012).

Pandangan semacam ini tidak hanya telah mengabaikan progresivitas sains khususnya dalam wacana pergeseran batas antara Fisika dan Metafisika (Pearce, 2017) serta *Metaverse*, yang berkembang sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21 (Amaizu et al., 2024; Iqbal & Campbell, 2023). Akan tetapi, juga potensial membuat kearifan lokal menjadi tidak mungkin dipertimbangkan sebagai salah satu jenis dari pengetahuan. Terhadap

pandangan tersebut, informan kami memberikan informasi yang—alih-alih menentang apa yang disebut sains positif, pendapat tersebut cukup berguna sebagai cara untuk melihat praktik dan mentalitas lokal dalam perspektif yang berbeda, di mana ARF menyatakan:

Secara tradisional, kami (suku Kajang) memiliki sistem pengetahuan tentang nilai, norma, dan tata cara praktik hidup di antara kami sendiri yang telah kami warisi secara turun temurun [...]; mungkin dianggap tidak relevan dengan zaman, tetapi saya secara pribadi menganggap, relevansi suatu budaya atau praktik lokal akan sangat ditentukan oleh bagaimana suatu masyarakat yang mewarisi budaya tersebut, mampu membaca zaman yang terus bergerak (W/ARF/10-05-2024).

Sistem pengetahuan seperti yang dinyatakan oleh informan dalam hal ini, dapat dipandang dalam kerangka pengertian sebagai pengetahuan petani tentang tanah dan pemburu mengenai hewan yang dalam pandangan Geertz (1983), dapat didefinisikan sebagai kumpulan pemikiran yang terorganisir, atau apa yang oleh Brush (2011) juga disebut sebagai informasi yang sistematis, yang didasarkan pada pengalaman, kearifan, dan praktik lokal; seringkali, memang disesuaikan dengan

ekosistem lokal (Ballard et al., 2008) sebagai basis nilai dan praktik komunal dalam suatu Masyarakat. Yang terpenting adalah, struktur pengetahuan juga melibatkan pembiasaan atau yang disebut oleh Bourdieu (2013) sebagai *Habitus*.

Habitus—secara sederhana didefinisikan sebagai proses yang melibatkan dan mengarah pada pengembangan, yang menghasilkan suatu struktur pemikiran dan tindakan (Bourdieu & Nice, 1992, 2000); yang mesti diperhatikan adalah bahwa *habitus* yang sama, seperti ditekankan oleh Reay (2004: hal 432) dapat mengarah pada praktik dan sikap yang sangat berbeda sama sekali, bergantung pada medan dan arenanya. Ini berarti seperti yang dinyatakan oleh Sayer (2005), *habitus* tidak bersifat deterministik dan tetap, melainkan dapat berubah. Lebih jauh, hal tersebut dimungkinkan karena formulasi dari dimensi sosial untuk memahami suatu cara pandang dan menanggapi perubahan itu sendiri, selalu berubah.

Ini penting untuk memahami *habitus* yang dikonseptualisasikan dalam studi ini bukan sebagai teori subjektivitas yang mendeskripsikan cara pandang dari struktur sosial tertentu, karena hal tersebut seperti

yang diingatkan oleh Skeggs (2004) akan membatasi pemahaman tentang kehidupan sosial. Melainkan sebagai suatu sistem yang dapat membantu mengatur pengalaman dan pikiran, serta perasaan dalam memahami dunia. Gambaran semacam itulah yang diproyeksikan oleh penjelasan ARF di atas, seperti yang dijelaskan oleh Desmarchelier (2000) sebagai peta jalan yang dirujuk dan memandu langkah mereka, dalam memaknai dan mengevaluasi praktik budayanya sendiri. Suatu pandangan yang mirip dengan praktik oto-kritik.

Pernyataan lain yang, dalam hal ini, memberi keterangan tentang suatu upaya adaptif sekaligus secara ekspilisit, merupakan langkah progresif menjaga eksistensi lokalitas budaya suku Kajang datang dari KR, sebagai salah satu tokoh Pendidikan dalam komunitas suku Kajang yang tidak hanya menjelaskan bagaimana mereka melangkah lebih jauh untuk suatu integrasi budaya lokal dengan progresivitas dari peradaban modern, namun juga dukungan dan *support* yang besar terhadap para generasi mereka untuk menimba ilmu dalam Masyarakat luas sebagai suatu upaya dinamis dalam melestarikan eksistensi lokalitas budaya.

Sebagai suatu warisan, tentu

saja kami mengajarkan kepada anak-anak juga generasi kami norma-norma umum [...] beberapa praktik eksklusif budaya juga, seperti bagaimana mereka harus hidup sesuai tata cara yang berlaku dalam komunitas [...] ritual pernikahan, serta acara-acara adat yang sakral [...] di luar semua itu, kami tidak pernah melarang atau membatasi generasi kami untuk berhubungan dengan Masyarakat luar, sebaliknya, kami mendorong mereka untuk belajar baik dari Masyarakat sekitar maupun masuk ke dalam “sekolah formal” untuk mendapatkan pengetahuan yang juga dipelajari oleh orang-orang di luar komunitas kami (W/KR/12-05-2024).

Terlihat dalam pernyataan tersebut, KR tidak hanya menjujukan suatu cara pandang yang terbuka dan inklusif dengan mendorong anak-anak dan generasi mereka untuk belajar dan terus beradaptasi. Namun lebih jauh, otoritas Masyarakat Kajang yang dalam hal ini diwakili oleh KR sebagai salah satu informan kami, tanpa ragu, menyatakan dukungan mereka terhadap upaya yang oleh sebagian orang—mungkin, akan dianggap dapat mencampur-adukan sistem kepercayaan dan juga pengetahuan lokal dengan hal-hal yang tidak berasal dari akar budaya lokal. Selain itu, apa yang dijelaskan oleh informan tersebut jelas menepis anggapan umum akan potensi kekerasan

simbolik yang juga menjadi perhatian Bourdieu (2013: hal 6) di mana, terjadi pemaksaan dalam bentuk penanaman secara paksa nilai, norma dan praktik hidup secara sewenang-wenang oleh otoritas budaya.

Jelas dalam hal ini bahwa praktik semacam itu, tidak terjadi dalam struktur Masyarakat Kajang. Kekerasan simbolik, sebagai salah satu produk sejarah yang menghasilkan praktik dan mereproduksi tindakan individu maupun kolektif, yang cenderung menjamin hanya satu kebenaran praktik atau tindakan tertentu dari waktu ke waktu dan lebih andal dari pada semua aturan formal, serta norma-norma eksplisit seperti yang dinyatakan oleh Bourdieu & Passeron (1990: hal 54), adalah hal yang sama sekali—atau setidaknya, tidak kami temukan dalam baik observasi yang dilakukan maupun tercermin dalam keterangan-keterangan responden kami.

Sebaliknya, informan kami yang lain seperti AF justru menegaskan fakta yang kami temukan bahwa dalam Masyarakat Kajang, terdapat cukup banyak Sarjana serta calon Sarjana yang telah berhasil membuktikan bahwa upaya melestarikan budaya dan lokalitas,

dapat dilakukan dengan menempuh Pendidikan formal yang karena demikian, juga membuktikan bahwa integrasi pengetahuan lokal dan formal dapat dilakukan dengan tanpa membuat eksistensi budaya mereka hilang atau tidak relevan dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan.

Kami mendorong anak-anak kami untuk bersekolah [...] setidaknya, terdapat lima hingga delapan puluh orang yang telah selesai menempuh jenjang strata satu termasuk saya sendiri, bahkan ada juga yang sedang menempuh Pendidikan Magister di beberapa Kampus di sekitar Sulawesi Selatan [...] Pendidikan sangat penting bagi kami sebagai satu cara untuk tetap menjaga eksistensi baik komunitas, maupun pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki suku Kajang [...] ini adalah salah satu modal kami, karena dengan adanya generasi yang berpendidikan baik formal, informal, maupun—dan atau bahkan secara nonformal, pengetahuan sangat penting bagi kami (W/AF/7-06-2024).

Kami menggaris bawahi poin penting di sini, dari keterangan yang diberikan oleh informan kami bahwa Pendidikan atau setidaknya generasi yang berpendidikan merupakan modal bagi eksistensi budaya suku Kajang. Seperti yang dikatakan oleh Bourdieu & Nice (1992: hal 53) bahwa habitus dibentuk oleh setidaknya kekayaan dari modal sosial, ekonomi, dan

budaya yang dimiliki oleh keluarga atau komunitas tertentu yang dikembangkan sejak usia dini.

Pada tahap ini, apa yang diberikan oleh informan kami (AF) bukanlah sekedar keterangan wawancara belaka, akan tetapi—dan yang lebih penting, adalah bahwa AF menunjukkan suatu bentuk kesadaran terhadap modal yang mereka miliki, yaitu pengetahuan, pendidikan dan budaya. Ini semakin diperkuat oleh hasil wawancara kami bersama informan lainnya yang juga menegaskan, pentingnya pengetahuan dan Pendidikan bagi Masyarakat Kajang. Dalam keterangannya, IR mengatakan:

Bagi kami, generasi yang berpengetahuan akan menjadi modal utama atau aset yang menentukan masa depan budaya [...] ini tidak terbatas pada pengetahuan tentang ritual atau praktik-praktik adat saja, namun dalam pengertian yang lebih luas (W/IR/18-06-2024).

Seperti telah diketahui, bahwa modal, oleh Bourdieu (1984: hal 114) dianggap sebagai seperangkat sumber daya dan kekuatan yang benar-benar berfungsi serta memiliki nilai pasar, dalam perjuangan untuk mendapatkan apa yang oleh Kingston (2001: hal 89) disebutnya sebagai hak istimewa. Ini sangat dimungkinkan

karena berbagai jenis pengetahuan dikonstruksi secara sosial, dan diberi nilai; apabila hal tersebut dianggap bernilai, sesuai secara budaya, pengetahuan dianggap sebagai aset dalam pengertian yang sama bahwa teori ekonomi memberikan nilai kepada modal. Namun, meskipun memiliki kemiripan dengan nilai ekonomi, modal di sini—dan terutama dalam konsep Bourdieu (2013), lebih kompleks.

Wilson & McGuire (2022) mengakui kompleksitas dari konsep habitus yang mencakup tidak hanya modal dan arena; dalam konteks ini, kami percaya bahwa habitus juga melibatkan keyakinan dan perilaku atau bahkan bahasa, pakaian serta tata krama. Berbagai keterangan dari para informan kami mengarah pada satu arah penjelasan yang implisit bahwa secara kolektif, Masyarakat suku Kajang dalam satu dan lain cara telah menanamkan kepada anak-anak mereka budaya yang kaya akan konten intelektual, yang mencakup tidak hanya pengetahuan terhadap budaya asli mereka sendiri akan tetapi juga melengkapinya dengan berbagai pengetahuan dan kearifan, yang dapat mereka peroleh dari Lembaga-lembaga formal Pendidikan.

Ini merupakan suatu langkah

progresif dari cara pandang yang terbuka dengan segala perubahan dan kemajuan peradaban, yang menciptakan praktik pengalaman terpadu melalui kombinasi pengetahuan formal dan lokal untuk mempertahankan eksistensi budaya. Kami mencoba menangkap bahwa apa yang membuat seluruh upaya Masyarakat Kajang dalam mempertahankan budaya mereka menjadi tampak mudah bagi mereka, ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki, mereka memiliki aset yang lebih banyak atau bahkan berlimpah secara intelektual, budaya dan sosial yang karenanya, seperti dinyatakan Bourdieu (2013: hal 49) reproduksi sosial tetap terjaga. Ini adalah kunci dalam sistem produksi dan reproduksi sosial-budaya pada hampir seluruh sistem sosial Masyarakat.

Didorong oleh transmisi pengetahuan serta dukungan modal budaya seperti dinyatakan Savage (2000) dalam konteks ini, mereka (Masyarakat Kajang) memberi tanggapan dan praktik kepedulian yang berfokus pada upaya mempertahankan apa yang disebut sebagai eksistensi budaya, dengan berfokus pada identitas sosial dan moral yang lebih universal. Meskipun

demikian, kompleksitas dari konsep habitus dan modal budaya yang beroperasi dalam medan sosial kompleks dan kaitannya dengan dinamika kekuatan yang selalu potensial bersaing, membuat kami berhati-hati dalam hal menyederhanakan konsepsi habitus. Hal ini penting untuk lebih jauh, menyiapkan kerangka kerja yang jelas untuk menafsirkan dan memahami aspek pengalaman para informan baik secara individual maupun kolektif melalui bahasa.

Bagaimanapun juga, produksi dan reproduksi normatif bahasa bagi Bourdieu (1991: hal 5), sebagian besar mengabaikan fungsi sosio-historis dan praktis bahasa. Karenanya, klaim utama kami dalam artikel ini adalah apa yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin atau bahkan mustahil dipahami dari suatu proses sosio-budaya, tidak relevan dengan temuan kami dalam kasus suku Kajang. Dengan satu alasan, bahwa terdapat keterbukaan yang cukup jelas dari para informan dalam hal memberikan keterangan yang berkaitan dengan aspek-aspek penting dari budaya mereka. Meskipun konsekuensi dari hal semacam ini adalah mungkin akan terdapat keterbatasan dalam

memahami asal-usul sosial suatu struktur Masyarakat tertentu, sehingga yang dihasilkan adalah ilusi legitimasi. Karena wacana, menyembunyikan hubungan kekuasaan antara si pembicara dan pendengar (Bourdieu, 1991: hal 7). Oleh karenanya, temuan kami akan lebih tepat dipahami sebagai upaya memberi suara pada budaya yang berusaha terus eksis dan menjadi kontemporer.

D. Kesimpulan

Pada akhirnya temuan kami menawarkan beberapa kerangka acuan penting, sebagai cara pandang baru untuk menangkap modalitas bagi eksistensi salah satu bentuk budaya yang berhasil mempertahankan diri di antara logika modernitas yang cukup dominan. **Pertama**, Masyarakat adat suku Kajang sebagai salah satu bentuk komunitas budaya yang dapat dikatakan terisolir, pada praktiknya, harus dipandang dalam kerangka yang normal sebagai suatu bentuk eksistensi Masyarakat dengan budaya mereka yang unik dan khas, di antara Masyarakat dan budaya lainnya yang beragam; **Kedua**, upaya Masyarakat suku Kajang dalam melestarikan eksistensi budaya dengan berbagai modalitas sosial dan intelektual yang mereka miliki, pada hakikatnya,

merupakan suatu manifestasi dari bentuk pikiran yang terbuka terhadap berbagai hal termasuk, untuk menjadi Masyarakat yang terdidik baik secara informal maupun formal. Hal ini dibuktikan dengan melimpahnya potensi intelektual dalam komunitas tersebut, yang terus mendorong generasi demi generasi untuk menerima perubahan dan

memanfaatkan Pendidikan sebagai strategi mempertahankan diri dan budaya mereka; **Ketiga**, dan dengan demikian, Masyarakat suku kajang telah membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai pengetahuan lokal dan formal dapat hidup berdampingan dan harmonis, sebagai perpaduan kearifan peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyemang, C. B., & Parimah, F. (2022). Media reportage of suicide among police officers in Ghana: A mixed method analysis. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2134352>
- Amaizu, G. C., Njoku, J. N., Lee, J. M., & Kim, D. S. (2024). Metaverse in advanced manufacturing: Background, applications, limitations, open issues & future directions. *ICT Express*, 10(2), 233–255. <https://doi.org/10.1016/j.ict.2024.02.010>
- Ballard, H. L., Fernandez-Gimenez, M. E., & Sturtevant, V. E. (2008). Integration of local ecological knowledge and conventional science: A study of seven community-based forestry organizations in the USA. *Ecology and Society*, 13(2). <https://doi.org/10.5751/ES-02594-130237>
- Batiran, K. B., & Salim, I. (2020). A tale of two kewangs: A comparative study of traditional institutions and their effect on conservation in maluku. *Forest and Society*, 4(1), 81–97. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.8186>
- Bourdieu, P. (1974). The School as a Conservative Force: Scholastic and Cultural Inequalities. In J. Eggleston (Ed.), *Contemporary Research in the Sociology of Education* ((ed), p. 32:46). Methuen.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (Trans. Ric). Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power* (J. Thompson (ed.)). Polity Press.
- Bourdieu, P. (2013). *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge). Cambridge University Press.
- Bourdieu, P., & Nice, R. (1992). *The Logic of Practice*. Standford: Standford Univerrsity Press.
- Bourdieu, P., & Nice, R. (2000).

- Pascalian Meditations*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. SAGE Publications.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. University of Chicago Press.
- Brush, S. B. (2011). Whose knowledge, whose genes, whose rights? In S. G. Harding (Ed.), *The postcolonial science and technology studies reader* ((ed), p. 225). Duke University Press.
- Desmarchelier, C. (2000). Teachers' Understanding of Homosexuality and Body Image: Habitus Issues. *The Journal of Men's Studies*, 8(2), 237–253. <https://doi.org/10.3149/jms.0802.237>
- Fazey, I., Fazey, J. A., Salisbury, J. G., Lindenmayer, D. B., & Dovers, S. (2006). The nature and role of experiential knowledge for environmental conservation. *Environmental Conservation*, 33(1), 1–10. <https://doi.org/10.1017/S037689290600275X>
- Fischer, F. (2000). *Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge*. Duke University Press.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Hommel, S., Vinke-de Kruijf, J., Otter, H. S., & Bouma, G. (2009). Knowledge and perceptions in participatory policy processes: Lessons from the Delta-Region in the Netherlands. *Water Resources Management*, 23(8), 1641–1663. <https://doi.org/10.1007/s11269-008-9345-6>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). *Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy*. Routledge.
- Iqbal, M., & Campbell, A. (2023). Metaverse as Tech for Good: Current Progress and Emerging Opportunities. *Virtual Worlds*, 2(4), 326–342. <https://doi.org/10.3390/virtualworlds2040019>
- Kajembe, G. C., Luogo, E. J., Kijazi, M. S., & Mwaipopo, C. S. (2003). The Role of Traditional Institutions in Forest Resources. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/13504500309469789>
- Kingston, P. W. (2001). Extra Issue: Current of Thought: Sociology of Education at the Dawn of the 21st Century. *Source: Sociology of Education*, 74(2001), 88–99. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>. <http://www.jstor.org>
- Pearce, J. (2017). Why these laws?—Multiverse discourse as a scene of response. *Perspectives on Science*, 25(3), 324–354.
-

- https://doi.org/10.1162/POSC_a_00245
- Petts, J., & Brooks, C. (2006). Expert conceptualisations of the role of lay knowledge in environmental decisionmaking: Challenges for deliberative democracy. *Environment and Planning A*, 38(6), 1045–1059. <https://doi.org/10.1068/a37373>
- Reay, D. (2004). “It’s all becoming a habitus”: Beyond the habitual use of habitus in educational research. *British Journal of Sociology of Education*, 25(4), 431–444. <https://doi.org/10.1080/0142569042000236934>
- Savage, M. (2000). *Class analysis and social transformation*. Open University Press.
- Sayer, A. (2005). *The Moral Significance of Class (Secondary Course)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schmidt, M. R. (2001). Grout: Alternative Kinds of Knowledge and Why They Are Ignored. In *Democracy, Bureaucracy, And The Study Of Administration* (1st Edt, p. 13). Routledge.
- Skeggs, B. (2004). Context and Background: Pierre Bourdieu’s Analysis of Class, Gender and Sexuality. *The Sociological Review*, 52(2_suppl), 19–33. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.2005.00522.x>
- Syahrul, N., Sunarti, S., Fatmahwati, F., Atisah, A., Yetti, E., Suryami, S., & Iswanto, A. (2023). Survival strategies of two changing societies’ customary consultative assemblies: The orahua of Nias and the kerapatan adaik of West Sumatra. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2286733>
- Taylor, B., & de Loë, R. C. (2012). Conceptualizations of local knowledge in collaborative environmental governance. *Geoforum*, 43(6), 1207–1217. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.03.007>
- Thomas, D. S. G. (1997). Science and the desertification debate. *Journal of Arid Environments*, 37(4), 599–608. <https://doi.org/10.1006/jare.1997.0293>
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous* ((1st ed.)). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203849903>
- van der Muur, W. (2018). Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 160–174. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495>
- van der Muur, W., & Bedner, A. (2016). Traditional Rule As “Modern Governance”: Recognising the Ammatoa Kajang Adat Law Community. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah*

- Mada, 28(1), 149.
<https://doi.org/10.22146/jmh.15871>
- Wilson, S., & McGuire, K. (2022). 'You feel a bit lost': a case study interpreting white, working-class mothers' engagement through habitus. *British Journal of Sociology of Education*, 43(2), 314–331.
<https://doi.org/10.1080/01425692.2022.2026762>
- Yang, L., & Wu, J. (2012). Knowledge-driven institutional change: An empirical study on combating desertification in northern china from 1949 to 2004. *Journal of Environmental Management*, 110, 254–266.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.06.025>